

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Tiongkok dan Jepang adalah dua negara di kawasan Asia Timur yang memiliki isu-isu *high politics* dan *low politics* yang menarik untuk dibicarakan. Selain memiliki kedekatan secara geografis, Tiongkok dan Jepang memiliki sejarah hubungan yang panjang yang diwarnai berbagai isu, mulai dari isu ekonomi sampai dengan isu militer. Isu militer inilah yang dulunya menyulut ketegangan serta menorehkan sejarah kelam hubungan kedua negara, terutama diakibatkan oleh semangat imperialisme Jepang yang didukung oleh keunggulannya dibidang militer.

Di era klasik militer Jepang adalah salah satu militer yang tak tertandingi yang sekelas dengan AS, Rusia dan beberapa negara maju lainnya. Keunggulan Jepang dalam bidang militer ini dapat dilihat dengan banyaknya negara di kawasan Asia yang menjadi wilayah taklukannya, tak terkecuali Tiongkok. Namun segala keunggulan dan kekuatan Jepang dalam bidang militer kemudian menjadi tidak berarti setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.<sup>1</sup> Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat dengan ditandatanganinya *The Pastdam Declaration* pada tanggal 15 Agustus 1945. Sejak saat itu, masyarakat Jepang harus menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat mengendalikan semua

---

<sup>1</sup> Ulfa, M. (2006). *Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Menuju Normal State*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

urusan negaranya. Segala sesuatu kebijakan harus tunduk kepada *Supreme Commander of Alliance Power* (SCAP).

Kemampuan Pertahanan Jepang kemudian dibatasi oleh pasal 9 konstitusi 1947. Adapun isi dari pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut :

*“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air force, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized”.*<sup>2</sup>

Pasal 9 dalam konstitusi 1947 tersebut menjelaskan adanya pelarangan terhadap agresi dan menolak semua kekuatan militer. Implikasinya adalah bahwa pertahanan Jepang tidak memiliki unsur militersitik dan tidak diizinkan untuk membentuk militer apapun meskipun industri Jepang mampu mengembangkannya.

Namun adanya persoalan keamanan regional Asia yang berasal dari negara-negara sekitar antara lain berasal dari nuklir Korea Utara, masalah selat Taiwan dan pengembangan militer Tiongkok mau tidak mau mendorong Jepang untuk mengandalkan kemampuan SDF-nya. Dorongan Amerika Serikat yang mendukung remiliterisasi Jepang agar bisa menjadi sekutu militernya yang kuat di Asia pun semakin memperkuat alasan Jepang untuk melakukan re-orientasi terhadap militernya. Hal tersebut tertuang dalam Program Kebijakan Pertahanan Jepang (*National Japanese Defense Progame Guidline/ NDPG*). Dalam NDPG atau kebijakan pertahanan Jepang tersebut terlihat bahwa Jepang mulai meggeser

---

<sup>2</sup> Takashi, I. (2000). Japanese Foreign Policy Today. In T. Jitsuo, *Ironies in Japan Defense and Disarmament Policy* (p. 137). New York: PALGRAVE™ 175 Fifth Avenue.

arah kebijakannya dari pasif menuju aktif. Salah satu buktinya adalah dengan peningkatan kapabilitas dan peranan SDF (*Self Defence Force*) tanpa melalui revisi artikel 9 Konstitusi Jepang.

Sejak SDF dibentuk pada tahun 1954, SDF berada di bawah sebuah badan keamanan (*Defence Agency*) yang bukan dibawah oleh Kementrian dalam Kabinet melainkan hanya merupakan badan yang dalam kantor Perdana Menteri. Hal ini mencerminkan status terbatas dari SDF yang sesuai dengan pasal 9 yang melarang Jepang memiliki angkatan perang. Keberadaan SDF atau pasukan bela diri Jepang ini hanya setara dengan polisi yang menjaga ketertiban dan secara ketat dibatasi hanya untuk melindungi Jepang dari serangan militer asing. Kesemua aspek tersebut menyebabkan Jepang menjadi sangat bergantung pada AS.<sup>3</sup>

Sejak berakhirnya perang dingin, pembatasan SDF mulai longgar. Hal ini ditandai dengan pengiriman pasukan SDF dalam operasi keamanan PBB pada tahun 1990-an dan bahkan belakangan juga ikut mendukung perang AS di Irak dan Afghanistan. Pada tahun 1990, UU Operasi Pemeliharaan Keamanan (*the Peacekeeping Operation Law-PKO Law*) diajukan oleh pemerintah Jepang namun gagal di *Diet*. Kemudian diajukan kembali pada tahun 1992 dan akhirnya di sahkan *Diet* dengan 5 prinsip yang kemudahan menjadi syarat pengiriman SDF Jepang, yaitu; (1) Sudah ada perjanjian gencatan senjata, (2) pihak yang bertikai bersedia menerima kehadiran pasukan perdamaian, (3) PKO bersifat imparsial, (4) Jepang bisa menarik diri dari kondisi tidak memuaskan, (5) Senjata yang

---

<sup>3</sup> Lillahi, R. (2014). *Postur Pertahanan Jepang Pasca Pembentukan Kementerian Pertahanan (2007-2013)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

digunakan SDF terbatas hanya untuk membela diri. Meskipun dibatasi dengan sejumlah syarat hal tersebut merupakan kemajuan yang luar biasa bagi peranan SDF di luar Jepang.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada Januari 2007 posisi SDF semakin diperkuat melalui pembentukan Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defence*) yang menggantikan Badan Pertahanan (*Defence Agency*) dan mendapat tempat *independent* di Kabinet. Langkah tersebut dianggap sangat strategis dalam rangka penguatan institusi dan proses normalisasi posisi militer dalam sistem pemerintah Jepang. Lebih jauh lagi ada perubahan yang juga signifikan yang mendampingi peningkatan status institusi militer, yaitu soal kegiatan militer SDF diluar negeri sebagai salah satu misi utama SDF, yang mana hal tersebut berdasarkan hasil revisi UU SDF. Revisi UU SDF ini telah melalui proses pembahasan *Diet* pada tanggal 15 Desember 2006, kemudian menjadi dasar pembentukan Kementerian Pertahan Jepang dan diresmikan pada 9 Januari 2007.

Sebelumnya Jepang dengan Konstitusi pertahanan Pasifisme, Jepang tidak diizinkan melakukan aktivitas militer. Jika terjadi amandemen pada konstisusi tersebut, militer Jepang tidak hanya bisa melakukan pertahanan diri tapi juga dapat melakuakan serangan balik jika diserang militer negara lain. Selain itu, Jepang juga diizinkan memberikan bantuan logistik militer dan informasi kepada negara lain serta SDF Jepang diperbolehkan membantu militer negara lain yang membutuhkan atau diperbolehkan diproyeksikan keluar negeri.<sup>5</sup> Dengan kata lain,

---

<sup>4</sup> Lillahi, R. (2014). *Ibid.*

<sup>5</sup> Dengan Revisi UU, Militer Jepang Lebih Proaktif. Diakses melalui <http://mediaindonesia.com/news/read/29495/dengan-revisi-uu-militer-jepang-lebih-proaktif/2016-02-19> pada tanggal 8 Desember 2016

SDF dapat memainkan peranan yang lebih menonjol secara regional dan global seperti melalui partisipasi dalam pengembangan misil pertahanan, operasi keamanan laut, operasi bantuan kemanusiaan dan inisiatif lainnya.<sup>6</sup> Secara umum, selain status SDF mengalami peningkatan yang tersermin dalam doktrin kebijakan pertahanannya, militer Jepang mengalami perkembangan dan pergeseran yang terlihat dari peningkatan anggaran militer dan teknologi militer yang semakin canggih.

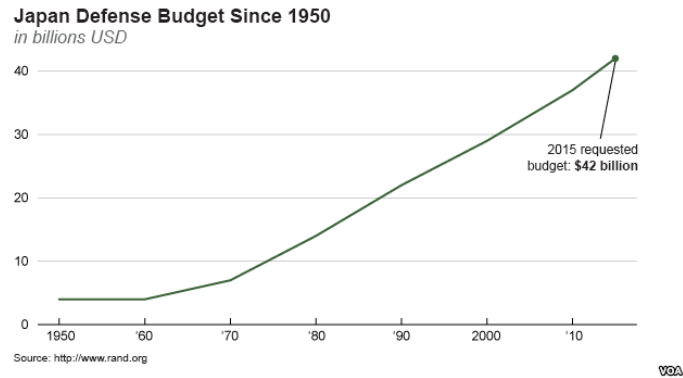
Anggaran Jepang terlihat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kabinet pemerintahan Jepang pada bulan Desember 2016 ini menyepakati anggaran militer terbesar Jepang sepanjang sejarah sejak Perang Dunia II sebesar USD43,6 miliar (Rp589,18 triliun) yang akan diberlakukan pada tahun fiskal 2017. Anggaran militer ini meningkat 1,4% dibandingkan anggaran tahun fiskal berjalan.<sup>7</sup> Anggaran belanja inipun terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan anggaran belanja Jepang dari tahun ke tahun.

---

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Jepang Tingkatkan Anggaran Militer. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1039186/149/jepang-tingkatkan-anggaran-militer-1441073103> pada tanggal 8 Desember 2016.

**Grafik 1.1. Anggaran Pertahanan Jepang.**



**Sumber: Japan Unveils Largest Ever Defense Budget** diakses melalui <http://www.voanews.com/a/japan-cabinet-approves-third-straight-defense-boost/2597568.html>

Berkaca pada situasi yang terjadi dalam hal ini Jepang, pada kenyataannya mempengaruhi dan menyulut kekhawatiran bagi negara-negara yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan Jepang. Sejarah mencatat, salah satu negara yang memiliki sejarah buruk dengan Jepang adalah Tiongkok. Kedua negara pernah terlibat dalam berbagai ketegangan bahkan terlibat dalam perang besar yang mengakibatkan Tiongkok menderita banyak kerugian. Yakni perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894- 1895 dan perang Tiongkok –Jepang kedua pada kisaran tahun 1937-1945. Perang Tiongkok-Jepang pertama dipicu oleh perebutan wilayah Korea oleh kedua negara yang sekaligus menjadi simbol kesuksesan modernisasi Jepang. Sedangkan perang Tiongkok dan Jepang kedua dilatar belakangi kebijakan imperialisme Jepang yang berkeinginan untuk mendominasi Tiongkok secara politisi maupun militer. Kedua perang besar antara Jepang dan Tiongkok tersebut merupakan cikal bakal hubungan tidak harmonis antara kedua negara. Permasalahan antara kedua negara tidak hanya sampai

sebatas perang di masa lampau saja. Di era modern ini kedua negara masih sering bersinggungan dalam hal isu kemanan diantaranya kedua negara masih sering terlibat dalam konflik perebutan wilayah kepulauan Senkaku atau Diayou. Selain itu, permasalahan dalam isu militer lainnya antara lain adalah kedua negara saling bersaing merebut pasar khususnya dalam industri senjata.

Melihat perkembangan isu keamanan Jepang tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana reaksi atau respon Tiongkok sebagai negara yang secara geografis dan historis yang mempunyai keterikatan dengan Jepang.

## **B. Rumusan Masalah**

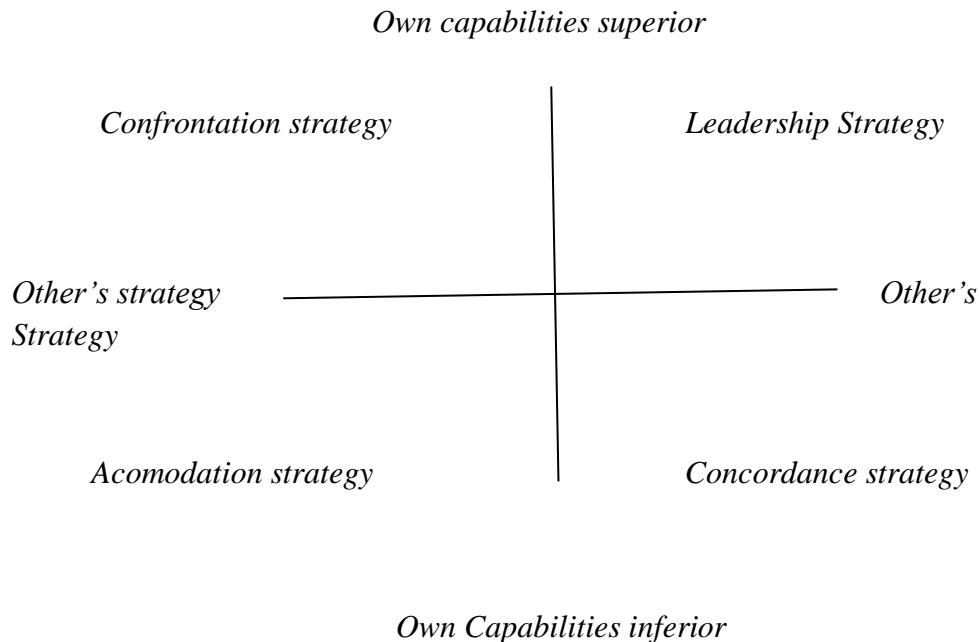
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana strategi pemerintah Tiongkok menghadapi kebangkitan militer Jepang?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **Konsep Strategi**

Menurut John P. Lovell, dalam menganalisis interaksi suatu negara dengan negara lain, dapat ditentukan melalui dua aspek, yaitu (1) Strategi yang dibuat oleh para pengambil keputusan berdasarkan strategi yang diambil oleh negara lain. (2) Strategi yang dibuat oleh para pengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan stabilitas nasional relatif mereka. Dengan demikian strategi politik luar negeri dapat dibagi kedalam empat tipe, yakni *leadership strategy*, *concordance strategy*, *accommodation strategy*, dan *confrontation strategy*.

**Bagan 1.1**  
**Tipologi Politik Luar Negeri**



*Sumber:* Lovell. Hal 99<sup>8</sup>

Berdasarkan Tipologi diatas, *Leadership Strategy* dipilih apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih kuat daripada negara lain dan strategi negara lain tersebut diyakini akan mendukungnya. Dibandingkan menggunakan cara-cara kekerasan negara yang menerapkan tipe strategi ini akan lebih berusaha mengendalikan negara lain secara persuasif dan tawar menawar (*bargaining*). Sebaliknya, *Concordance strategy* dipilih apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih lemah daripada negara lain dan strategi negara lain diyakini akan mendukungnya. Oleh karenanya negara yang

---

<sup>8</sup> Pendapat Lovell dalam Erik Fariphasa, dikutip dari Fredy B. L. Tobing, "*Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Bantuan IMF Dalam Pemulihan Krisis Ekonomi 1997-1998: Studi Tentang Proses Pembuatan Keputusan Oleh Pemerintah*" Proposal Disertasi Program Doktor Ilmu Politik FISIP UI, Jakarta, 2008 hal 15-17.



menerapkan strategi ini akan berusaha memelihara hubungan yang harmonis dengan negara lain yang dianggap memiliki kapabilitas lebih kuat dari dirinya. Kebijakan-kebijakan yang cenderung tidak menimbulkan konflik pun akan dibuat oleh negara yang menerapkan strategi ini serta akan mendukung inisiatif-inisiatif dari negara yang dianggap memiliki kapasitas lebih kuat darinya.

Adapun *Acomodation strategy* dipilih apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih lemah daripada negara lain, sehingga diyakini kapabilitas negara lain dapat mengancam negaranya. Oleh karena itu, negara ini akan berusaha menyesuaikan diri dengan menghindari setiap kemungkinan konflik. Bentuk Strategi Akomodasi biasanya melalui kompromi dalam bentuk diplomasi, *lobbying*, nota protes, dll. Sedangkan apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih kuat daripada negara lain dan memandang adanya ancaman dari strategi negara lain, maka pilihannya adalah *Confrontation strategy*. Oleh karena itu, negara ini akan berusaha mempertajam setiap permasalahan yang ada dengan negara lain dan memaksa negara lain tersebut untuk mengubah posisinya sebagai bentuk pengakuan atas superioritasnya itu. Bentuk Konfrontasi biasanya berupa boikot, embargo maupun melalui kekuatan militer.

Dalam kasus strategi Tiongkok atas perubahan kebijakan pertahanan Jepang, penulis memosisikan Tiongkok menggunakan strategi Konfrontasi. Strategi konfrontasi diambil apabila pembuat keputusan memandang kapabilitas negaranya lebih kuat daripada negara lain dan memandang adanya ancaman dari strategi negara lain.

Tiongkok dipandang lebih kuat daripada Jepang karena beberapa alasan. Pertama, Tiongkok memiliki kekuatan militer yang lebih kuat dari Jepang. Walaupun Jepang menunjukkan tanda-tanda perubahan kebijakan pertahannya namun kapasitas militer Tiongkok dianggap masih lebih unggul daripada Jepang.<sup>9</sup>

Kuat lemahnya kapabilitas suatu negara antara lain dapat diukur melalui kemampuan militer dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam bidang ekonomi, pada tahun 2014 menurut data yang dilansir dari *Internastional Monetary Fund* (IMF) Tiongkok berhasil menduduki tingkat perekonomian pertama didunia.<sup>10</sup> Kemudian dalam bidang militer menurut survey yang dilakukan oleh *globalfirepower.com* pada tahun 2016 Tiongkok meduduki posisi ke-3 dari negara-negara didunia dalam bidang militer melapau Jepang yang berada di tingkat ke-7.

Dengan adanya fakta perbandingan kemampuan militer dan ekonomi antara Tiongkok dan Jepang tersebut, terlihat jelas bahwa Tiongkok dalam kapabilitas negara, lebih unggul dibandingkan dengan Jepang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John P. Lovell yaitu, negara yang mengambil strategi konfrontasi adalah negara yang merasa bahwa kapabilitas negaranya lebih kuat daripada negara lain dan memandang adanya ancaman dari strategi negara lain.

Dalam perspektif Tiongkok, strategi yang dianggap mengancam bagi keberadaanya adalah Jepang menunjukkan peningkatan-peningkatan dalam bidang militer dan adanya kenyataan bahwa Jepang terlihat semakin menggeser

---

<sup>9</sup> Adhe Nuansa Wibisono, *Peningkatan Kapabilitas Militer Cina dalam Upaya Menjadi Negara Hegemon Di Kawasan Asia*, Jakarta: Universitas Indonesia

<sup>10</sup> China resmi jadi negara ekonomi nomor satu di dunia, diakses melalui <https://www.merdeka.com/dunia/china-resmi-jadi-negara-ekonomi-nomor-satu-di-dunia.html> pada tanggal 8 Desember 2016

arah kebijakan pertahanannya dari pasif menuju aktif salah satunya melalui penguatan fungsi SDF nya . Hal lain adalah bahwa ekonomi Jepang yang terus tumbuh mendukung bagi pertumbuhan anggaran belanja militer Jepang. Tiongkok memandang bahwa dengan isu perubahan pertahanan dan keamanan yang ditunjukkan Jepang ini memberikan peluang bagi Jepang untuk punya kapasitas atau strategi yang lebih agresif.

Bahkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei mengatakan hal yang kurang lebih sama. Adanya isu perkembangan militer Jepang tersebut menimbulkan kekhawatiran pemerintah Tiongkok. Adanya kebangkitan militer yang ditunjukkan Jepang bagi Tiongkok dianggap bertolak belakang dengan perkembangan zaman yang menjunjung tinggi pengembangan perdamaian. Bagi Tiongkok reformasi militer Jepang hanya akan menimbulkan ancaman baru berupa *security dilemma* dan mengubah keseluruhan strategi pemeliharaan kawasan Asia.<sup>11</sup>

### **Konsep Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)**

*Balance of power* sebagai kebijakan nasional. Metafora perimbangan kekuatan dipakai untuk menggambarkan suatu jenis kebijaksanaan tertentu, biasanya kebijaksanaan membentuk aliansi defensif demi mencegah agar suatu koalisi tidak memperoleh posisi dominan. Dalam hal ini paling tidak suatu negara (aktor) utama harus berperan sebagai *balancer*. Aktor penyeimbangan ini harus

---

<sup>11</sup> Jepang Bangkitkan Militernya, China Tersinggung . Diakses melalui <https://international.sindonews.com/read/878798/40/jepang-bangkitkan-militernya-china-tersinggung-1404209368> pada 28 Desember 2016

secara sadar bertindak untuk mencegah agar tidak satu negara pun bisa memperbesar diri terlalu jauh.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua perbedaan dalam *balance of power*, yaitu antara *hard balancing* dan *soft balancing*. *Hard balancing* mengacu pada strategi oleh negara-negara kecil untuk membangun dan memperbaharui kemampuan militer mereka, serta menciptakan dan memelihara aliansi formal, informal, dan kontra aliansi untuk menciptakan kemampuan yang lebih kuat. Sementara itu *soft balancing* merupakan tindakan balancing sementara dalam aliansi, terutama dalam bentuk meningkatkan persenjataan secara terbatas, kerjasama dalam pelatihan atau kelaborasi pada lembaga-lembaga regional atau internasional.<sup>13</sup> Hal ini selaras dengan upaya Tiongkok dalam memperkuat dan meningkatkan aliansi militer melalui latihan militer bersama dengan Rusia di wilayah yang berbatasan dengan wilayah Jepang.

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini yaitu strategi pemerintah Tiongkok menghadapi kebangkitan militer Jepang adalah :

1. Meningkatkan kualitas militer dengan cara aktif melakukan latihan militer bersama negara sekutu
2. Meningkatkan anggaran militer untuk mendukung peningkatan kualitas militer

---

<sup>12</sup> Mohtar Mas' oed, 2004. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. LP3ES. Hlm. 133.

<sup>13</sup> Michel Fortman, T.V Paul, dan James J. Wirtz. 2004. *Balance of Power: Theory and Practive in the 21<sup>st</sup> Century*. California: Stanford University Pres, hlm. 3

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat hal yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Jepang
2. Mengetahui bagaimana perubahan kebijakan Jepang terhadap isu keamanan tersebut dapat berpengaruh terhadap lingkungan eksternalnya
3. Mengetahui strategi pemerintah Tiongkok menghadapi isu keamanan Jepang tersebut

## **F. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai respon Tiongkok terhadap kebangkitan militer Jepang, maka penulis membatasi penelitian ini dari tahun 2007-2016.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksploratif melalui pengumpulan data dalam bentuk studi literatur. Kajian literatur yang digunakan dalam penelitian mengedepankan penggunaan buku-buku yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pengkajian. Selain buku, sumber lain yang digunakan diantaranya adalah artikel jurnal, laporan, dan artikel internet untuk menunjang penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar mudah dipahami, maka karta tulis ini dibagi secara sistematis menjadi 5 bab antara lain sebagai berikut:

**BAB I :** Memaparka pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, teori dan aplikasi teori, hipotesa,, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II:** Membahas tentang dinamika hubungan Tiongkok dan Jepang

**BAB III:** Membahas tentang perkembangan isu pertahanan dan militer Jepang

**BAB IV:** Membahas strategi militer Pemerintah Tiongkok terhadap kebangkitan militer Jepang

**BAB V:** Berisi kesimpulan secara keseluruhan dari bab-bab sebelumnya.